

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan persoalan yang dibahas. Kajian-kajian tersebut digunakan sebagai sumber rujukan, dasar pembandingan, serta pijakan dalam penentuan topik penelitian. Setiap penelitian sebelumnya akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian selanjutnya:

- a.) Penelitian yang dilakukan oleh Pabian L Masola (2022) yang berjudul *Si Miskin selalu ada padamu Suatu Kajian Stigmatisasi terhadap Pak Ogah ditinjau dari Yohanes 12:8*. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Para pak ogah hanya mengalami stigmatisasi dari segelintir orang, dan mereka yang menjadi pak Ogah di Bogor Timur, tidak pernah memaksa para pengguna jalan raya untuk memberi mereka uang, mereka melakukan kerja sebagai pak Ogah dengan Ikhlas, jadi mereka juga ikhlas seberapa saja yang diberi mereka terima dan ikhlas jika tak diberi. Dengan adanya kepedulian terhadap si Miskin, diharapkan terjadi perubahan sosial dan adanya sikap saling menolong dari yang sudah ditolong kepada yang perlu ditolong. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu fenomena Pak Ogah sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat perkotaan. Keduanya sama-sama menolak untuk sekadar

memandang Pak Ogah sebagai persoalan kriminalitas atau pelanggaran hukum, melainkan mencoba memahami makna sosial yang lebih luas. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian Masola lebih menekankan pada perspektif agama dan stigma sosial yang melekat pada Pak Ogah, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap praktik Pak Ogah di Kota Malang dengan menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya teori interaksionisme simbolik.

- b.) Penelitian yang dilakukan oleh Sopian Tamrin dkk (2023) yang berjudul Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan ruang publik jalan raya adalah pilihan eksistensi paling memungkinkan bagi pak ogah. Fenomena pak ogah juga menunjukkan masalah kelas bawah pada masyarakat perkotaan. Pak ogah sebagai pekerjaan yang cukup bersahabat dengan masyarakat kelas bawah karena tidak memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan keahlian yang khusus, dan dapat dilakukan dengan waktu yang longgar. Jalan raya sebagai ruang publik dipahami sebagai arena dimana mereka bisa mendapatkan penghidupan sekaligus mengekspresikan eksistensi dan aktualisasinya. Fenomena ini merupakan satu pertarungan eksistensi sekaligus bentuk ekspresi atas minimnya ruang publik yang ada di kota makassar. Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu

menempatkan ruang publik jalan raya sebagai arena penting yang memungkinkan munculnya peran Pak Ogah di tengah keterbatasan sistem formal dalam pengaturan lalu lintas. Di sisi lain terdapat perbedaan yaitu jika penelitian Tamrin dkk lebih menekankan posisi Pak Ogah dalam struktur sosial perkotaan, sementara penelitian ini lebih menggarisbawahi konstruksi makna sosial yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari antara masyarakat dan Pak Ogah dan memiliki lokasi yang berbeda.

- c.) Penelitian yang dilakukan oleh Rina Nurhayati dkk (2024) yang berjudul Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta). Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pak Ogah” merupakan sebutan bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja yang mengatur hampir di setiap persimpangan jalan. Penghasilan yang mereka dapatkan dari setiap pengendara berkisar mulai Rp. 500, -s/d Rp. 2.000, - dan terkadang ada pengendara yang sengaja memberi lebih. Penghasilan tersebut jika dikalkulasikan dalam waktu satu jam minimal Rp. 50.000, - sampai Rp. 200.000, - tergantung keramaian di pusat Kota Purwakarta. Profesi pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta belum sesuai dengan ekonomi syariah, karena pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yang menjalankan tugasnya hanya sebatas mengejar pemberian dari para pengemudi

roda 2 khususnya roda 4, selain itu banyak ditemukan juga posisi dan instruksi pengatur belokan jalan tidak berlandaskan pada keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dari penelitian ini memiliki persamaan, yaitu keduanya juga menyoroti problematika yang muncul akibat keberadaan Pak Ogah, baik dari sisi aturan lalu lintas maupun respon masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Rina Nurhayati dkk menggunakan perspektif ekonomi syariah, sehingga analisis utamanya menilai kesesuaian praktik Pak Ogah dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan etika dalam Islam. Sementara itu, skripsi ini lebih menekankan pada *persepsi masyarakat* di Kota Malang, dengan mengkaji bagaimana masyarakat memberi makna terhadap keberadaan Pak Ogah—apakah dianggap membantu, mengganggu, atau bahkan menimbulkan dilema sosial-hukum.

- d.) Penelitian yang dilakukan oleh A. Zaky Fuad (2024) yang berjudul *Efektivitas Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Perspektif Maqasidh Al-Syariah*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan lain beranggapan bahwa Pak Ogah terkadang malah menjadi penyebab kemacetan itu sendiri dan bahkan melakukan tindakan paksa untuk meminta bayaran atas

jasanya. Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu menunjukkan adanya ambivalensi: antara melihat Pak Ogah sebagai solusi spontan atas keterbatasan sistem lalu lintas, atau sebagai masalah sosial yang menimbulkan potensi konflik dengan pengguna jalan dan aparat. Di sisi lain memiliki perbedaan yaitu terletak pada fokus kajian. Penelitian Zaky Fuad lebih menekankan pada *perspektif maqasidh al-syariah*, sehingga orientasi utamanya adalah menilai apakah keberadaan Pak Ogah membawa kemaslahatan atau mudarat dalam pandangan hukum Islam. Sementara itu, skripsi Anda menitikberatkan pada *persepsi masyarakat* di Kota Malang, dengan menggali bagaimana masyarakat memberi makna terhadap fenomena ini dalam konteks sosial perkotaan, bukan dalam kerangka hukum Islam.

e.) Penelitian yang dilakukan oleh Dika Pola Rizki dkk (2025) yang berjudul Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas informal tidak memiliki landasan legalitas yang sah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas melarang setiap pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jalan umum. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan mereka masih terus ditemukan di berbagai wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*)

dengan realitas sosial di lapangan (das sein). Di satu sisi, sebagian masyarakat menganggap kehadiran mereka membantu memperlancar arus lalu lintas di titik-titik kemacetan; di sisi lain, sebagian masyarakat lainnya menilai keberadaan mereka justru mengganggu ketertiban dan menimbulkan potensi risiko kecelakaan. Faktor pekerjaan sering kali menjadi alasan utama yang melatarbelakangi keberlangsungan aktivitas ini, meskipun secara hukum tidak dibenarkan. Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas fenomena pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah) yang muncul di perkotaan. Keduanya menyoroti bagaimana masyarakat memberikan penilaian yang berbeda terhadap peran mereka, apakah dianggap membantu mengurangi kemacetan atau justru menimbulkan masalah sosial. Perbedaannya yaitu jika penelitian Dika Pola Rizki dkk menitikberatkan pada aspek hukum, khususnya ketidaksesuaian aktivitas pengatur lalu lintas informal dengan UU No. 22 Tahun 2009, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Sementara itu, skripsi Anda lebih berfokus pada persepsi masyarakat Kota Malang, dengan pendekatan sosiologis untuk memahami makna sosial dari praktik Pak Ogah dalam kehidupan perkotaan, bukan dari sisi legalitas hukum. Berikut dalam bentuk tabel:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul / Nama Penulis / Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Si Miskin selalu ada padamu Suatu Kajian Stigmatisasi terhadap Pak Ogah ditinjau dari Yohanes 12:8 / Pabian L Masola / 2022	Keberadaan Pak Ogah kerap dipandang negatif hanya oleh sebagian kecil masyarakat. Padahal, mereka menjalankan pekerjaannya dengan ikhlas, menerima seberapa pun pemberian yang diberikan pengguna jalan, bahkan tidak keberatan jika tidak diberi sama sekali. Fenomena ini menunjukkan adanya nilai kepedulian sosial terhadap kaum miskin serta harapan akan terjadinya perubahan sosial yang lebih humanis.	Sama-sama menyoroti fenomena Pak Ogah sebagai bagian dari dinamika sosial, bukan sekedar kriminalitas. Perbedaannya, Masola lebih menekankan stigma sosial dan perspektif agama, sedangkan penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat di Kota Malang dengan pendekatan sosiologis (interaksionisme simbolik).

<p>2.</p>	<p>Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar / Sopian Tamrin dkk /2023</p>	<p>Jalan raya menjadi arena paling memungkinkan bagi Pak Ogah untuk bertahan hidup dan mengekspresikan eksistensinya. Fenomena ini erat kaitannya dengan persoalan masyarakat kelas bawah di perkotaan, karena pekerjaan tersebut tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus dan dapat dilakukan secara fleksibel. Namun, fenomena tersebut juga menggambarkan minimnya ruang publik di kota yang dapat diakses masyarakat kecil.</p>	<p>Sama-sama melihat jalan raya sebagai ruang publik yang memungkinkan munculnya peran Pak Ogah. Bedanya, penelitian Tamrin menekankan posisi Pak Ogah dalam struktur sosial perkotaan, sementara penelitian ini menyoroti konstruksi makna sosial dari interaksi masyarakat dengan Pak Ogah di Kota Malang.</p>
<p>3.</p>	<p>Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif</p>	<p>Pak Ogah mendapat penghasilan Rp500–2.000 per kendaraan, bisa</p>	<p>Sama-sama menyoroti problematika keberadaan Pak Ogah dalam lalu lintas</p>

	<p>Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta) / Rina Nurhayati dkk / 2024</p>	<p>mencapai Rp50.000– 200.000 per jam tergantung keramaian. Namun praktik ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena hanya berorientasi pada pemberian pengemudi dan tidak memperhatikan aspek keamanan serta ketertiban lalu lintas.</p>	<p>dan respon masyarakat. Perbedaan utama, penelitian Nurhayati menggunakan perspektif ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat secara umum dengan pendekatan sosiologis.</p>
<p>4.</p>	<p>Efektivitas Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Perspektif Maqasid Al- Syariah / A. Zaky Fuad / 2024</p>	<p>Adanya pandangan yang beragam. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai keberadaan Pak Ogah membantu mengurai kemacetan dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai kehadiran mereka justru</p>	<p>Sama-sama menunjukkan adanya ambivalensi dalam menilai Pak Ogah, antara dianggap membantu atau justru mengganggu. Bedanya, penelitian Fuad menilai dari perspektif maqasid al-syariah, sementara penelitian ini lebih menekankan persepsi</p>

		menimbulkan kemacetan baru dan bahkan kerap memaksa pengendara untuk memberi imbalan.	masyarakat perkotaan di Malang dalam konteks sosial.
5.	Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram / Dika Pola Rizki dkk / 2025	Pak Ogah tidak memiliki landasan hukum sesuai UU No. 22/2009. Ada kesenjangan antara aturan hukum (das sollen) dengan praktik sosial (das sein). Sebagian masyarakat merasa terbantu, sebagian lain menilai mengganggu dan berisiko. Faktor ekonomi menjadi alasan keberlangsungan praktik ini.	Sama-sama membahas fenomena pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah). Bedanya, penelitian Rizki dkk menekankan pada legalitas hukum dan kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Malang menggunakan pendekatan sosiologis.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Persepsi

Dalam bahasa Inggris, kata "perception" berarti: "persepsi, penglihatan," dan "tanggapan." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "persepsi" didefinisikan sebagai respon atau penerimaan langsung dari proses atau kejadian. Persepsi merupakan proses mental ketika seseorang menangkap, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap objek atau peristiwa di sekitarnya. Proses ini tidak hanya bergantung pada apa yang dilihat atau dialami secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pengetahuan, serta pengalaman individu. Seseorang menggunakan panca inderanya untuk mengetahui beberapa hal. Persepsi seseorang mempengaruhi sikapnya, dan mempengaruhi perilakunya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa persepsi mempengaruhi perilaku seseorang atau bahwa perilaku seseorang mencerminkan persepsinya (Nisa, Ananda Hulwatun., 2023).

Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito, persepsi adalah proses yang diawali dengan pengindraan, yaitu penerimaan rangsangan oleh individu melalui pancaindra atau sering disebut sebagai proses sensoris. Tahap ini kemudian berkembang menjadi pemahaman terhadap informasi yang diperoleh, baik melalui komunikasi maupun interaksi kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap individu pada dasarnya selalu terlibat dalam proses persepsi (Walgito, 2004).

Sedangkan menurut P. Robbins dan Timothy dalam bukunya *Perilaku Organisasi*, persepsi diartikan sebagai proses ketika seseorang menyusun serta menafsirkan rangsangan sensorik untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Akan tetapi, apa yang dipersepsikan individu tidak selalu sama dengan realitas objektif. Dengan kata lain, meskipun objeknya sama, setiap orang dapat memiliki tanggapan yang berbeda. Oleh sebab itu, cara seseorang menilai suatu situasi sering kali lebih berpengaruh daripada situasi nyata itu sendiri (Jayanti, Fitri., 2018).

Dalam teori persepsi sosial, (Bruner, 1957) menekankan bahwa persepsi dipengaruhi oleh harapan dan pengalaman masa lalu. Sedangkan, menurut Jalaludin Rakhmat (2007), persepsi sosial merupakan usaha seseorang untuk memahami objek dan peristiwa sosial dalam masyarakat tempat tinggalnya. Persepsi sosial lebih kompleks karena melibatkan evaluasi orang lain berdasarkan pengalaman, nilai - nilai budaya, pendidikan, motivasi, dan lingkungan sosial (Rakhmat, 2007). Dalam konteks penelitian ini, persepsi sosial terhadap praktik Pak Ogah memainkan peran penting karena menentukan sikap dan tindakan terhadap fenomena sosial yang mengatur arus lalu lintas informal.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi antara lain pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, nilai budaya, motivasi, hingga harapan individu. Misalnya, pengemudi yang

pernah terbantu oleh Pak Ogah akan lebih cenderung menilai positif, sedangkan mereka yang merasa dipaksa memberi uang atau melihat pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai prosedur bisa memandang negatif. Selain itu, status sosial-ekonomi juga berpengaruh: sebagian masyarakat kelas bawah mungkin melihat Pak Ogah sebagai bentuk solidaritas dan pekerjaan alternatif, sementara kelompok lain bisa menganggapnya sebagai pelanggaran aturan formal.

Dalam konteks penelitian ini, bagi sebagian orang kehadiran Pak Ogah dianggap membantu karena mereka bisa memperlancar arus lalu lintas di titik-titik yang rawan kemacetan, khususnya di perempatan kecil atau jalan alternatif yang jarang dijaga aparat resmi. Namun, ada juga masyarakat yang menilai keberadaan Pak Ogah justru menimbulkan persoalan baru, misalnya karena cara mereka mengatur lalu lintas tidak sesuai aturan atau karena adanya permintaan imbalan yang dirasa mengganggu. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman Pak Ogah mengenai prosedur pengaturan lalu lintas yang sesuai aturan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pengguna jalan (Romadhona, Prima J., 2020).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbentuk melalui interaksi sehari-hari dengan Pak Ogah, pengalaman saat berkendara, serta nilai-nilai yang dianut. Misalnya, pengendara yang sering terbantu akan memandang positif, sementara mereka yang merasa dipaksa atau tidak nyaman cenderung memandang

negatif. Karena itu, penelitian tentang persepsi ini bukan hanya melihat “apa yang dilakukan Pak Ogah”, tetapi lebih menekankan pada “bagaimana masyarakat menilai dan memberi makna” terhadap praktik tersebut.

2.2.2 Dinamika Sosial Perkotaan

Dinamika sosial perkotaan merujuk pada berbagai perubahan dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di wilayah kota. Dalam kajian sosiologi, kota tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang kompleks, di mana terjadi hubungan antara individu, kelompok, serta institusi formal dan informal. Kota juga dipandang sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat dari wilayah pedesaan, sehingga menjadi ruang bertemunya berbagai kepentingan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif sosiologi perkotaan, kota berkembang sebagai ruang yang tidak terlepas dari logika kapitalisme. David Harvey menjelaskan bahwa kota merupakan *space of capital*, yaitu ruang yang secara aktif diproduksi, diorganisasi, dan dimanfaatkan untuk kepentingan akumulasi modal (Harvey, 2001b). Artinya, ruang kota bukanlah sesuatu yang netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pusat perdagangan, hingga pengaturan mobilitas yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Konsep *space of capital* menunjukkan bahwa setiap sudut kota memiliki nilai ekonomi dan fungsi tertentu dalam mendukung perputaran kapital. Akibatnya, akses terhadap ruang kota menjadi tidak merata, sehingga memunculkan ketimpangan sosial antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dengan mereka yang tidak. Dalam konteks ini, kota tidak hanya menjadi pusat peluang, tetapi juga ruang yang memproduksi ketidaksetaraan.

Menurut David Harvey dalam *Spaces of Capital*, konsep *space of capital* menjelaskan bahwa ruang tidak bersifat netral, melainkan diproduksi dan diorganisasikan oleh kapitalisme untuk menunjang proses akumulasi modal. Kapital bergerak secara geografis, menciptakan dan memanfaatkan ruang melalui pembangunan, investasi, serta ekspansi wilayah. Ruang diproduksi melalui pembangunan dan investasi untuk menunjang sirkulasi kapital, sementara kapital itu sendiri terus bergerak mencari lokasi yang lebih menguntungkan. Dalam kondisi krisis, kapitalisme melakukan apa yang disebut *spatial fix*, yaitu memperluas atau membangun ruang baru untuk menyerap kelebihan modal. Proses ini pada akhirnya menghasilkan ketimpangan spasial antarwilayah sebagai konsekuensi dari distribusi kapital yang tidak merata (Harvey, 2001a).

Ketimpangan antara desa dan kota menjadi salah satu faktor utama terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih

baik. Namun, peluang kerja di sektor formal yang terbatas tidak mampu menampung seluruh penduduk yang datang ke kota. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat harus mencari alternatif mata pencaharian di sektor informal sebagai strategi bertahan hidup dalam struktur ekonomi kota yang kompetitif.

Sektor informal merupakan bagian dari dinamika sosial perkotaan yang tidak dapat dipisahkan dari logika kapitalisme kota. Dalam kerangka *space of capital*, sektor informal muncul sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya inklusif. Artinya, ketika ruang kota didominasi oleh kepentingan kapital formal, sebagian masyarakat yang tidak terserap akan memanfaatkan ruang-ruang tersisa untuk menciptakan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Dalam praktiknya, kehidupan sosial di kota tidak sepenuhnya diatur oleh sistem formal. Masyarakat seringkali membentuk mekanisme sosial sendiri sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan pengaturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang perkotaan, realitas sosial yang terjadi di lapangan dapat lebih dominan dibandingkan dengan aturan formal yang berlaku, terutama ketika kebutuhan praktis lebih mendesak daripada kepatuhan normatif.

Dengan demikian, fenomena Pak Ogah dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial perkotaan yang berkaitan dengan konsep *space of capital*. Keberadaan Pak Ogah menunjukkan bagaimana individu memanfaatkan ruang kota khususnya ruang lalu lintas sebagai

peluang ekonomi di tengah keterbatasan akses terhadap sektor formal. Praktik ini mencerminkan adanya hubungan antara struktur ekonomi kota yang berbasis kapital dengan strategi adaptif masyarakat dalam mempertahankan kehidupan melalui aktivitas informal di ruang publik. Kondisi ini menegaskan bahwa kota dalam perspektif sosiologi perkotaan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga arena kontestasi ekonomi dan sosial.

2.2.3 Perkembangan Historis Sektor Informal di Perkotaan

Sebagai bagian dari dinamika sosial perkotaan, keberadaan sektor informal tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan kota itu sendiri. Fenomena sektor informal di wilayah perkotaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang seiring dengan perkembangan kota. Dalam kajian sosiologi perkotaan, pertumbuhan sektor informal berkaitan erat dengan dinamika urbanisasi, perubahan struktur ekonomi, serta keterbatasan sistem formal dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, banyak penduduk dari wilayah pedesaan berpindah ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak terserap dalam sektor

formal, sehingga mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi informal sebagai strategi bertahan hidup.

Dalam konteks negara berkembang, sektor informal cenderung lebih dominan dibandingkan dengan negara maju. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas ekonomi formal dalam menyerap tenaga kerja, serta lemahnya sistem regulasi dan pengawasan di ruang publik. Sebaliknya, di negara maju, sistem ekonomi yang lebih stabil dan terstruktur memungkinkan sebagian besar tenaga kerja terserap dalam sektor formal, sehingga ruang bagi aktivitas informal menjadi lebih terbatas.

Dengan demikian, sektor informal di perkotaan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketimpangan ekonomi dan keterbatasan struktur formal dalam sistem kapitalisme. Keberadaan sektor ini bukan hanya mencerminkan kekurangan sistem formal, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi di lingkungan perkotaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor informal di perkotaan tidak hanya menjadi fenomena ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan cara masyarakat beradaptasi terhadap keterbatasan struktur formal. Dalam konteks penelitian ini, praktik seperti Pak Ogah dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan historis sektor informal, yang muncul sebagai respons terhadap

kebutuhan ekonomi sekaligus celah dalam sistem pengaturan formal di ruang publik.

2.2.4 Praktik Sosial Pak Ogah dalam Konteks Perkotaan

Fenomena Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas informal di ruang publik sudah menjadi hal yang cukup sering ditemui di banyak kota besar di Indonesia, termasuk Malang. Mereka biasanya beraksi di persimpangan jalan kecil, perempatan, atau titik rawan macet yang jarang dijaga petugas resmi. Walaupun sering menimbulkan pro dan kontra, peran mereka tetap diakui sebagian orang karena membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Fenomena ini sebenarnya lahir dari keterbatasan aparat dalam mengawasi seluruh jalur, sehingga masyarakat menutup celah tersebut dengan cara-cara informal. Namun, di sisi lain, kehadiran Pak Ogah juga sering dipandang melanggar aturan karena tidak memiliki kewenangan resmi dan berisiko menimbulkan masalah keselamatan.

Menurut Bourdieu (1986), praktik sosial terbentuk dari interaksi antara habitus (kebiasaan dan nilai individu), modal (sumber daya ekonomi dan sosial), dan arena (ruang sosial tempat individu berinteraksi) (Fashri, 2010). Dalam konteks ini, praktik sosial dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial ekonomi. Penerapan pemahaman ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan peran negara di ruang publik kota. Fenomena ini juga sejalan dengan konsep urbanisme informal oleh (Simone, 2014), yang

menunjukkan bagaimana penduduk kota berinovasi untuk bertahan hidup meskipun kurangnya dukungan dari sistem formal.

Jika dilihat dari sisi sosial-ekonomi, banyak Pak Ogah berasal dari kelompok masyarakat bawah dengan pekerjaan tidak tetap dan pendidikan terbatas. Menjadi pengatur lalu lintas informal ini dianggap sebagai jalan cepat untuk mendapat penghasilan, meskipun jumlahnya kecil dan tidak menentu. Jalan raya, yang sebenarnya ruang publik, akhirnya berubah menjadi arena mencari nafkah sekaligus ruang ekspresi sosial bagi mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat perkotaan dengan keterbatasan akses pekerjaan formal tetap berusaha bertahan melalui strategi ekonomi informal (Faradila, 2024).

Dalam kacamata sosiologis, Pak Ogah bisa dipandang sebagai aktor yang “mengisi celah” dalam pengaturan lalu lintas di kota. Kehadiran mereka memperlihatkan bagaimana ruang publik di kota kerap dikelola bukan hanya oleh negara atau aparat, tetapi juga oleh warga biasa yang mencoba mengambil peran. Fenomena ini sekaligus mengungkap persoalan ketimpangan kesempatan kerja serta lemahnya tata kelola transportasi di perkotaan.

Respon masyarakat terhadap keberadaan Pak Ogah pun berbeda-beda. Ada pengendara yang merasa terbantu karena arus lalu lintas menjadi lebih lancar, terutama di titik yang rawan macet. Namun, ada juga yang menilai praktik ini mengganggu karena

sering disertai permintaan uang dan pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai aturan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas interaksi sosial di kota, di mana satu fenomena bisa dimaknai secara positif maupun negatif tergantung pengalaman dan sudut pandang masing-masing.

Dengan demikian, praktik Pak Ogah tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas “mengatur lalu lintas” semata. Fenomena ini merefleksikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat urban, dinamika ruang publik, serta relasi antara masyarakat dan negara. Untuk itu, keberadaan mereka sebaiknya dipahami secara lebih luas, tidak sekadar persoalan ketertiban jalan, melainkan juga sebagai cermin bagaimana kota dikelola dan bagaimana warga beradaptasi dengan keterbatasan yang ada.

2.2.3 Profesi Pengaturan Transportasi Jalan Raya

Profesi pengaturan angkutan jalan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas di ruang publik. Peran Pak Ogah sering dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial sekaligus strategi bertahan hidup dalam menghadapi keterbatasan ekonomi (Umar, Firman., 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna solidaritas sosial ke arah tindakan - tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, hal ini menggambarkan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu dalam ruang publik. Masyarakat yang memandang peran Pak Ogah secara positif cenderung melihat tindakannya sebagai solusi praktis untuk kemacetan lalu lintas, sementara yang lain menganggap perilakunya mengganggu ketertiban lalu lintas.

Dalam konteks Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 265 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa petugas pengatur lalu lintas harus memiliki sertifikasi dan dilengkapi dengan perlengkapan serta pakaian dinas yang memadai. Namun di sisi lain, praktik sosial yang dilakukan Pak Ogah menunjukkan munculnya pekerjaan informal yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas lalu lintas resmi dan rendahnya tingkat lapangan kerja formal di sektor perkotaan. Fenomena ini menunjukkan tumpang tindih antara profesi resmi dan praktik sosial informal dalam sistem transportasi.

Profesi pengaturan lalu lintas juga dapat dipahami melalui perspektif interaksionisme simbolik, di mana makna sosial dari tindakan “ mengatur lalu lintas ” dibentuk melalui interaksi antara Pak Ogah dan pengguna jalan. Menurut (Blumer, 1969), tindakan sosial seseorang didasarkan pada makna yang diberikan individu terhadap objek sosial dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, aksi Pak Ogah bukan sekadar aktivitas fisik mengatur lalu

lintas, tetapi juga merupakan cara membangun pengakuan sosial, solidaritas, dan eksistensi diri di ruang publik perkotaan.

Dengan demikian, profesi mengatur lalu lintas jalan dapat dilihat dari dua perspektif: secara formal sebagai profesi yang diatur oleh hukum, dan secara informal sebagai inisiatif sosial yang digerakkan oleh masyarakat (*UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2009). Kedua aspek ini berinteraksi dalam ruang sosial Kota Malang, menciptakan dinamika yang menarik antara legalitas, norma sosial, dan kebutuhan praktis di lapangan. Fenomena ini menjadi landasan krusial dalam memahami persepsi masyarakat memandang keberadaan dan peran Pak Ogah di berbagai lokasi jalan.

2.2.4 Konsep *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Konsep *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* diperkenalkan oleh Ferdinand Tönnies untuk menjelaskan dua bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. *Gemeinschaft* merujuk pada hubungan sosial yang bersifat personal, emosional, serta didasarkan pada kedekatan dan rasa kebersamaan yang kuat, seperti yang umumnya ditemukan dalam masyarakat tradisional. Sementara itu, *Gesellschaft* menggambarkan hubungan sosial yang bersifat impersonal, rasional, dan diatur oleh sistem formal, seperti hukum dan institusi dalam masyarakat modern (Tönnies, 1957).

Dalam konteks masyarakat perkotaan, kehidupan sosial pada dasarnya cenderung mengarah pada bentuk *Gesellschaft*, di mana interaksi sosial diatur oleh aturan formal, sistem birokrasi, serta norma hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya, kehidupan sosial di kota tidak sepenuhnya berjalan secara rasional dan formal. Masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai *Gemeinschaft*, seperti adanya toleransi, hubungan sosial yang fleksibel, serta praktik negosiasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan, khususnya di Indonesia, tidak sepenuhnya bersifat *Gesellschaft*, melainkan merupakan kombinasi antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Nilai-nilai paguyuban masih cukup kuat, yang tercermin dalam sikap saling memaklumi, toleransi terhadap praktik informal, serta kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan melalui pendekatan sosial dibandingkan pendekatan formal.

Keberadaan karakter *Gemeinschaft* dalam masyarakat perkotaan ini berdampak pada tidak selalu tegasnya penerapan sistem birokrasi formal di lapangan. Aturan yang seharusnya bersifat mengikat seringkali mengalami penyesuaian melalui praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam kondisi tertentu, hal ini membuka ruang bagi terjadinya negosiasi antara aktor-aktor informal dengan pihak yang memiliki otoritas formal.

Fenomena Pak Ogah dapat dipahami dalam kerangka ini sebagai praktik sosial yang berada di antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Di satu sisi, keberadaan mereka diterima dan ditoleransi oleh masyarakat sekitar karena dianggap membantu serta telah menjadi bagian dari keseharian, yang mencerminkan karakter *Gemeinschaft*. Di sisi lain, interaksi yang terjadi antara Pak Ogah dan pengguna jalan bersifat transaksional, di mana terdapat pertukaran jasa dan imbalan, yang menunjukkan karakter *Gesellschaft*.

Dampaknya, sistem birokrasi formal tidak selalu berjalan secara tegas di lapangan. Dalam beberapa situasi, aturan yang seharusnya bersifat mengikat justru mengalami penyesuaian melalui praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya negosiasi antara pelaku praktik informal, seperti Pak Ogah, dengan aparat atau pihak yang memiliki otoritas.

Dengan demikian, konsep *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* tidak hanya membantu menjelaskan bentuk hubungan sosial dalam masyarakat perkotaan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik informal seperti Pak Ogah dapat muncul, bertahan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik yang secara formal diatur oleh sistem hukum.

2.2.5 Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer

Dalam penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh Herbert Blumer. Interaksionisme simbolik menempatkan simbol sebagai elemen sentral dalam komunikasi antarindividu. Simbol bukan sekedar tanda, melainkan sarana yang memungkinkan manusia untuk saling memahami dan berinteraksi secara bermakna (Blumer, 1969).

Blumer menjelaskan bahwa interaksi manusia bersifat interpretatif, di mana individu tidak secara langsung merespons tindakan orang lain, melainkan terlebih dahulu menafsirkan makna dari tindakan tersebut. Dengan demikian, tindakan sosial manusia bukan sekedar reaksi otomatis, tetapi merupakan hasil dari proses pemaknaan yang dibentuk melalui interaksi sosial.

Dalam konteks praktik Pak Ogah, simbol-simbol seperti isyarat tangan, suara teriakan, dan gestur tubuh menjadi media komunikasi yang mengandung makna khusus bagi pendara dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan simbol-simbol tersebut, Pak Ogah dan para pengguna jalan saling membentuk pengertian bersama mengenai aturan dan kondisi lalu lintas yang terjadi saat ini.

Menurut Herbert Blumer, pakar interaksionisme simbolik, organisasi masyarakat manusia merupakan kerangka di mana tindakan sosial tidak ditentukan oleh tindakan individu. Blumer menyatakan bahwa istilah "interaksi simbolik" mengacu pada

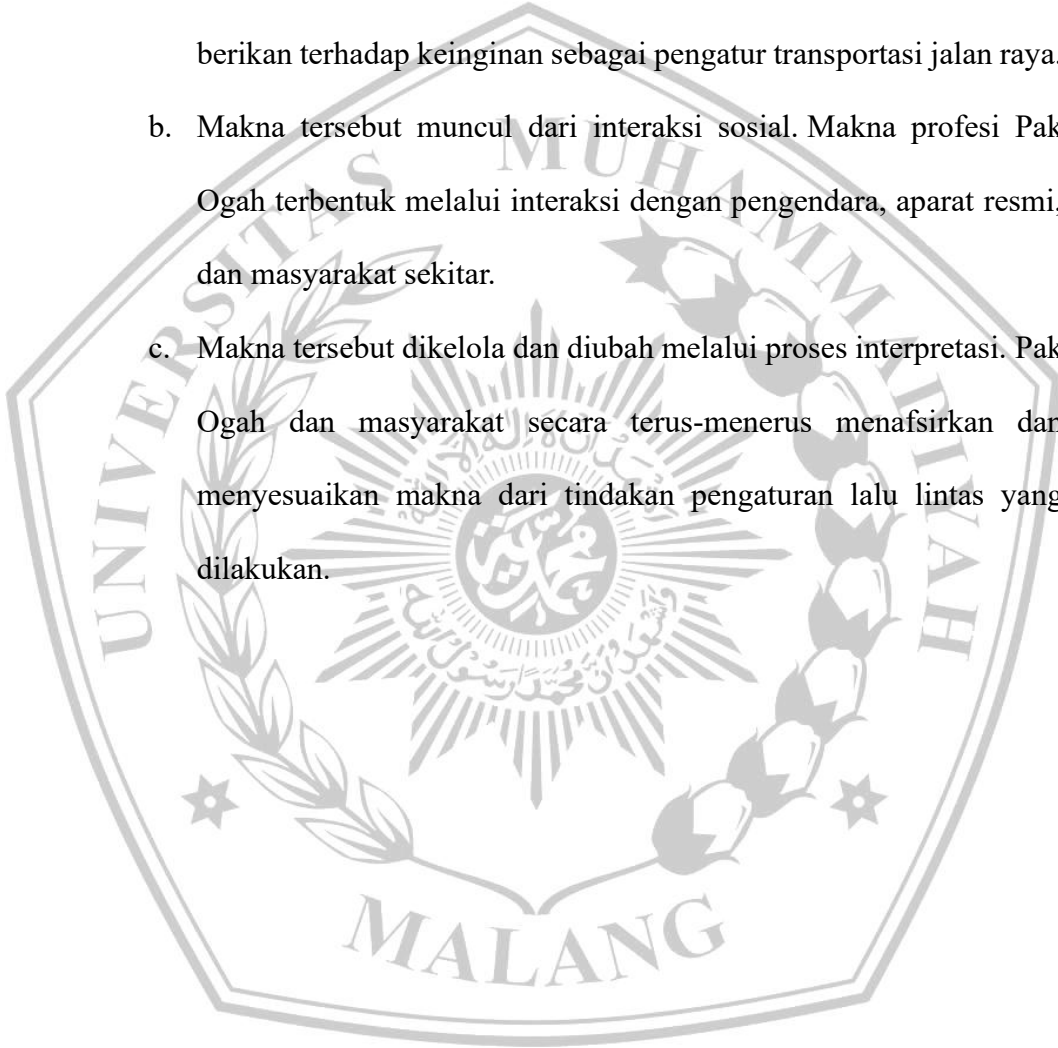
karakteristik unik dari interaksi antarmanusia. Orang-orang saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya. bukan sekedar reaksi belaka terhadap tindakan orang lain, namun didasarkan pada “makna” yang diberikan orang lain terhadap tindakan mereka. Interaksi antar individu, seperti penggunaan simbol, interpretasi, atau mencoba memahami maksud tindakan satu sama lain (George, 2007).

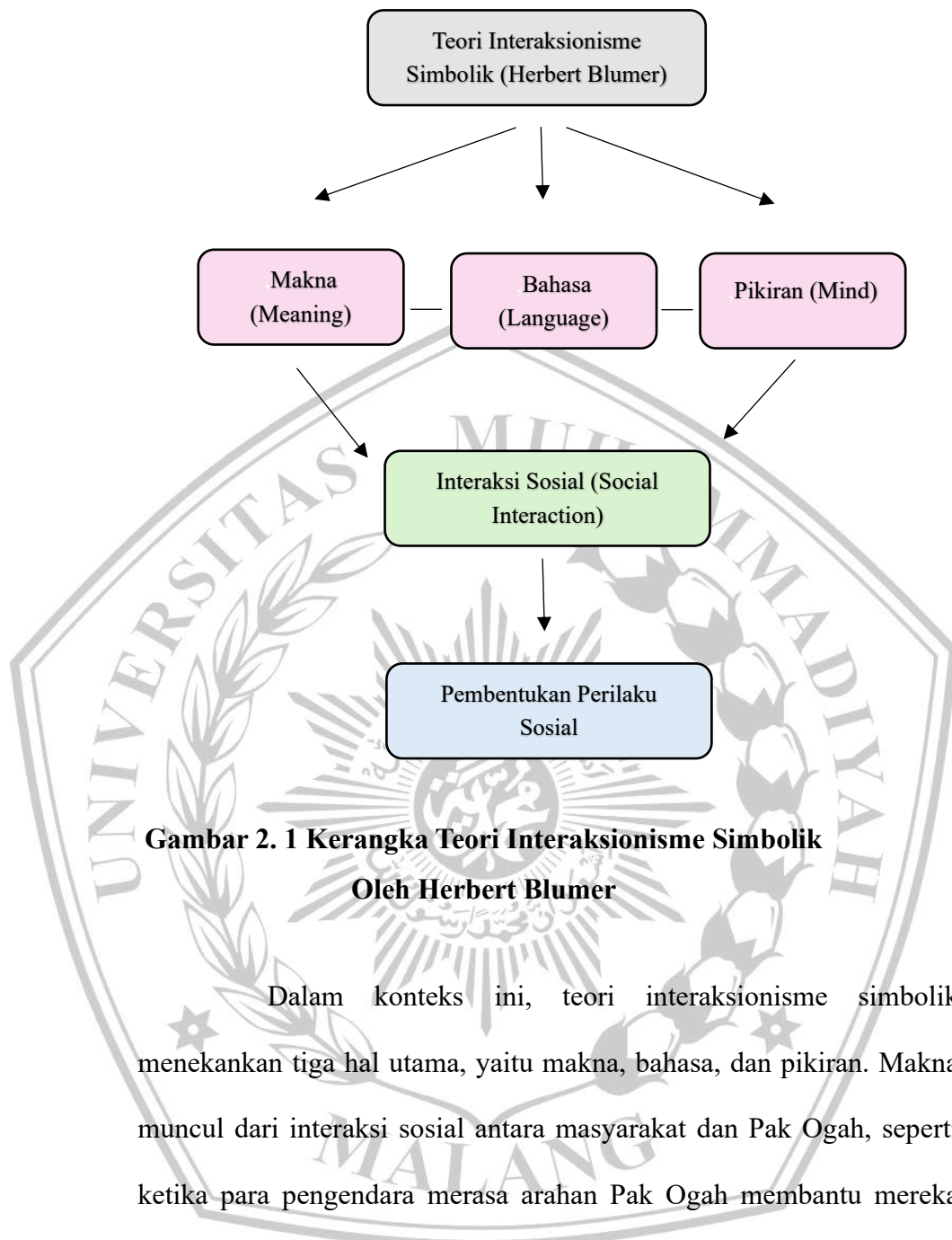
Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia bukan hanya reaksi refleks terhadap rangsangan eksternal adalah proses tindakan yang didasarkan pada makna yang diberikan seseorang kepada objek atau situasi tertentu. Makna ini muncul dan berkembang dalam konteks sosial melalui interaksi sosial dan komunikasi simbolik antar individu. Blumer menjelaskan bahwa sebagai aktor sosial, manusia aktif memahami simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi, termasuk bahasa dan tindakan. Simbol-simbol ini menentukan persepsi dan perilaku seseorang.

Dalam hal persepsi praktik Pak Ogah, teori Blumer dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menilai dan memahami tindakan Pak Ogah dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengaturan lalu lintas informal di Kota Malang. Persepsi masyarakat terbentuk oleh interaksi sosial yang terdiri dari pengalaman, simbol, dan komunikasi antara pengguna jalan, petugas resmi, dan Pak Ogah.

Herbert Blumer menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam interaksionisme simbolik (Blumer, 1969), yaitu:

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang diberikan terhadap sesuatu tersebut. Dalam hal ini, tindakan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas didasarkan pada makna yang ia berikan terhadap keinginan sebagai pengatur transportasi jalan raya.
- b. Makna tersebut muncul dari interaksi sosial. Makna profesi Pak Ogah terbentuk melalui interaksi dengan pengendara, aparat resmi, dan masyarakat sekitar.
- c. Makna tersebut dikelola dan diubah melalui proses interpretasi. Pak Ogah dan masyarakat secara terus-menerus menafsirkan dan menyesuaikan makna dari tindakan pengaturan lalu lintas yang dilakukan.





**Gambar 2. 1 Kerangka Teori Interaksionisme Simbolik
Oleh Herbert Blumer**

Dalam konteks ini, teori interaksionisme simbolik menekankan tiga hal utama, yaitu makna, bahasa, dan pikiran. Makna muncul dari interaksi sosial antara masyarakat dan Pak Ogah, seperti ketika para pengendara merasa arahan Pak Ogah membantu mereka dalam berjalan di jalan. Bahasa berperan sebagai simbol yang dinyatakan melalui gerakan tangan, isyarat tangan, peluit, sorakan atau bahkan ekspresi wajah Pak Ogah yang menjadi panduan bagi para pengguna jalan. Selain itu, pikiran mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memahami, memikirkan, dan memutuskan

bagaimana merespons tindakan Pak Ogah, seperti mengikuti arahan, mengabaikan, atau merasa tidak setuju.

Melalui ketiga konsep tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi antara Pak Ogah dan masyarakat bukan sekadar aktivitas fisik di jalan, melainkan merupakan proses sosial yang melibatkan pertukaran simbol, pembentukan makna, serta interpretasi yang terus berlangsung. Persepsi masyarakat terhadap Pak Ogah terbentuk dari pengalaman interaksi yang berulang, sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi yang dihadapi.

Dengan kondisi tersebut perilaku yang terlihat antara masyarakat dan Pak Ogah tidak hanya sekadar tindakan fisik di ruang publik, tetapi merupakan hasil dari beberapa proses berpikir, memahami, dan mengartikan simbol-simbol yang muncul dalam berinteraksi. Misalnya, ketika masyarakat merasa terbantu oleh Pak Ogah saat jam sibuk, mereka cenderung merespons dengan mengucapkan terima kasih atau memberi uang secukupnya. Respons tersebut tidak hanya sekadar tindakan spontan, melainkan mencerminkan nilai, norma, dan budaya masyarakat Kecamatan Lowokwaru yang menghargai bantuan, meskipun bantuan tersebut berasal dari profesi informal.

Dalam hal persepsi Pak Ogah, teori Blumer dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menilai dan memberi makna terhadap tindakan Pak Ogah. Persepsi masyarakat terbentuk dari pengalaman nyata mereka, simbol-simbol yang digunakan Pak Ogah,

serta komunikasi spontan antara pengguna jalan dan Pak Ogah itu sendiri (Effendi, Erwan., 2024). Persepsi yang positif muncul ketika masyarakat merasa mendapat manfaat langsung, seperti yang sering dialami pengendara di kawasan Tlogomas pada jam kerja pagi hari. Saat itu, kehadiran Pak Ogah membantu memperlancar persimpangan yang padat, sehingga pengguna jalan merasa lebih aman dan terbantu.

Di sisi lain, persepsi negatif bisa muncul bukan karena paksaan atau pemalakan, tetapi karena tindakannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau standar keselamatan tertentu. Beberapa orang yang menggunakan jalan raya merasa bahwa isyarat tangan yang kurang jelas, pengaturan arus yang tidak selaras dengan rambu-rambu resmi, atau kehadiran Pak Ogah yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan berpotensi membingungkan pengendara. Ada juga kalangan masyarakat yang merasa kehadiran pengatur lalu lintas non-resmi seperti Pak Ogah bisa menciptakan ambiguitas, terutama ketika lalu lintas sedang ramai atau pada situasi tertentu seperti kegiatan besar lainnya.

Teori interaksionisme simbolik sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pada bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Lowokwaru terhadap praktik Pak Ogah muncul, dipertahankan, dan bisa berubah lewat interaksi masyarakat di ruang jalan raya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa persepsi masyarakat terhadap Pak Ogah adalah produk sosial yang dibentuk oleh interaksi simbolik yang kompleks.